

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Uni Eropa (UE) telah lama dipandang sebagai model paling sukses dari proses integrasi regional di era modern. Melalui pendekatan yang bertahap dan berbasis institusi, UE berhasil menyatukan negara-negara di kawasan Eropa yang sebelumnya memiliki sejarah panjang akan konflik dan perpecahan pasca Perang Dunia II. Upaya awal proses integrasi ini dimulai pada tahun 1951, dimana terbentuk suatu otoritas bernama *European Coal and Steel Community* (ECSC). Pembentukan otoritas tersebut menjadi salah satu langkah penting dalam mewujudkan proses integrasi kawasan Eropa. Keberhasilan ECSC melahirkan pembentukan *European Economic Community* (EEC) yang berhasil memperluas proses integrasi ekonomi di Eropa dengan menciptakan sebuah pasar bersama (Borchardt, 1995; European Union, n.d.-c).

Proses integrasi ekonomi UE sendiri dibangun secara bertahap, dimulai dari *Free Trade Area* (FTA) yang menghapus tarif antar negara anggota, berlanjut ke *Customs Union* yang telah menyeragamkan tarif eksternal bersama (European Parliamentary Research Service, 2017), kemudian *Common Market* yang memungkinkan pergerakan bebas barang, jasa, modal dan tenaga kerja antar negara anggota (European Parliament, 2026), hingga *Single European Market* yang memperdalam integrasi pasar secara menyeluruh (European Union, n.d.-d). Bagi sebagian negara anggota, pendalaman integrasi berlanjut ke *Eurozone* atau kawasan

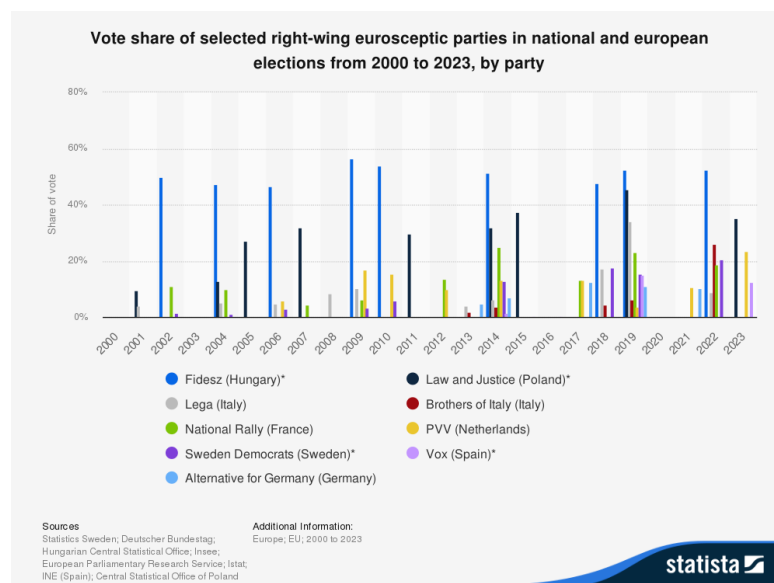
ekonomi yang mengadopsi euro sebagai mata uang resmi negaranya (European Union, n.d.-e).

Selama beberapa dekade belakangan ini, UE terus berkembang hingga menjadi salah satu entitas supranasional paling berpengaruh dengan penekanan terhadap prinsip-prinsip kebebasan, kesetaraan, demokrasi, *rule of law* (supremasi hukum) dan hak asasi manusia (European Union, n.d.-b). Prinsip-prinsip tersebut tertuang dalam *Treaty of European Union Article 2* dan menjadi persyaratan normatif yang perlu dipatuhi oleh seluruh negara anggota (European Union, n.d.-a). Dengan demikian, partisipasi dalam UE menjadi sebuah kesepakatan normatif bersama yang mengikat secara hukum dan politik.

Dalam hubungan internasional, keberadaan UE kerap dijadikan sebagai sebuah preseden untuk menjelaskan bagaimana institusi supranasional dapat menyeimbangkan kepentingan nasional negara dengan agenda kolektif integrasi regional. Namun, seiring berkembangnya kebijakan dan kewenangan UE, muncul ketegangan antara agenda integrasi supranasional dan kepentingan nasional negara-negara anggota. Fenomena ini melahirkan Euroskeptisisme, yaitu sebuah keraguan atau penentangan terhadap integrasi Eropa dan legitimasi UE sebagai lembaga supranasional yang dipicu atas kekhawatiran akan ancaman terhadap kedaulatan nasional (Condruz-Băcescu, 2014). Sikap Euroskeptisisme ini seringkali berakar pada kekhawatiran ekonomi maupun identitas (Csehi & Zgut, 2020) dan telah mendorong kemunculan tokoh-tokoh dan partai-partai politik yang menggunakan retorika nasionalis, populis dan anti-UE di berbagai negara anggota.

Selama beberapa tahun belakangan ini, fenomena Euroskeptisisme mengalami peningkatan drastis di berbagai negara di kawasan Eropa. Puncak dari fenomena ini terlihat dalam peristiwa Brexit pada tahun 2016, ketika Inggris memutuskan untuk keluar dari keanggotaan UE akibat kekhawatiran terhadap isu imigrasi, kedaulatan nasional dan penolakan terhadap supremasi hukum UE (Arnosson & Zoega, 2018). Namun, peristiwa Brexit bukan satu-satunya bentuk penentangan terhadap UE. Dalam beberapa kasus lainnya, penentangan terhadap UE justru datang dari negara anggota yang tetap menjadi bagian dari UE tetapi secara terbuka menentang kebijakan dan otoritas UE sebagai lembaga supranasional dari dalam.

Salah satu kasus yang menunjukkan bentuk pertentangan dari dalam tersebut adalah Hungaria. Viktor Orbán merupakan Perdana Menteri Hungaria yang menjadi salah satu tokoh euroskeptis paling vokal di Eropa. Setelah memenangkan pemilihan umum pada tahun 2010, Orbán dan partainya Fidesz, telah mengusung agenda yang didasarkan pada nasionalisme, populisme dan penentangan terhadap nilai-nilai liberal milik UE (Vadhanavisala, 2020). Dalam laporan yang dirilis oleh European Parliamentary Research Service, Fidesz menjadi partai kanan euroskeptis yang paling dominan di Eropa selama dua dekade belakangan ini dengan jejak kemenangannya selama 14 tahun. Jejak tersebut melampaui partai-partai euroskeptis lainnya seperti Law and Justice (PiS) di Polandia atau Lega di Italia (European Parliamentary Research Service et al., 2023).



Gambar 1.1. Perolehan Suara Partai Sayap Kanan Euroskeptik dalam Pemilu Nasional dan Eropa, 2000-2023

Sumber: (European Parliamentary Research Service et al., 2023)

Dominasi Fidesz yang tergambar dalam grafik di atas menunjukkan perubahan politik domestik Hungaria yang semakin menjauh dari nilai-nilai kolektif UE. Dalam praktiknya, Euroskeptisisme pemerintahan Orbán termanifestasi dalam berbagai dimensi kebijakan secara bersamaan, mulai dari reformasi peradilan yang melemahkan independensi lembaga hukum, transformasi kebijakan media yang memperkuat kendali pemerintah atas ruang informasi publik, penolakan terhadap mekanisme suaka dan sistem kuota migran UE, resistensi terhadap integrasi energi dalam kerangka *Energy Union*, hingga pemblokiran kebijakan sanksi kolektif UE terhadap Rusia pasca invasi Ukraina tahun 2022. Skala dari penentangan tersebut menjadikan Hungaria menarik untuk dikaji lebih dalam karena terdapat kontradiksi antara status Hungaria sebagai negara anggota UE dengan realita pemerintah Hungaria yang secara konsisten mengambil sikap

euroskeptis yang menjadi sebuah tantangan besar terhadap model regionalisme yang diusung oleh UE.

Sikap euroskeptis pemerintahan Orbán telah menimbulkan ketegangan serius antara Hungaria dan UE. UE mengecam tindakan pemerintah Orbán karena dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar UE, seperti hak asasi manusia dan penegakan hukum (European Council on Refugees and Exiles, 2024; International Organization for Migration Hungary, n.d.). Sebagai respons atas sikap euroskeptis tersebut, institusi-institusi UE telah mengeluarkan berbagai kecaman, termasuk rekomendasi dari Komisi Venis, laporan oleh Parlemen Eropa serta serangkaian prosedur pelanggaran yang diajukan oleh Komisi Eropa (Csillag, 2015; Halmai, 2017; Sadecki, 2014). Namun, langkah tersebut belum sepenuhnya berhasil menghentikan arah politik pemerintah Hungaria yang menegaskan perlindungan kedaulatan nasional dan nilai-nilai tradisional dalam menghadapi tekanan supranasional.

Kasus Hungaria semakin menarik untuk ditelaah lebih lanjut karena terdapat paradoks yang mendasarinya. Di satu sisi, Hungaria adalah negara anggota yang tetap berada dan menjadi bagian dari UE dan menerima manfaat finansial dari keanggotaannya yang mencapai rata-rata 4,3 miliar euro per tahun antara 2010 dan 2022 (Gulácsi & Kerényi, 2023). Di sisi lain, pemerintah secara konsisten menentang mekanisme, nilai dan otoritas supranasional UE yang menjadi syarat keanggotaan. Dengan demikian, keunikan-keunikan tersebut menjadikan Hungaria menarik untuk dikaji lebih lanjut untuk memahami bagaimana sikap euroskeptis

Hungaria di bawah kepemimpinan Viktor Orbán berimplikasi terhadap hubungan keanggotaannya pada UE.

Penelitian ini akan menggunakan kerangka teori neofungsionalisme sebagai teori disintegrasi yang dikembangkan oleh Schmitter & Lefkofridi (2016) untuk menganalisis dinamika *spillback* dalam hubungan keanggotaan Hungaria dengan UE melalui empat aspek, yaitu interdependensi dan konvergensi ekonomi, legitimasi publik dan politisasi integrasi, kepatuhan terhadap hukum dan otoritas supranasional serta respons terhadap kebijakan bersama dalam situasi krisis. Berdasarkan paparan latar belakang di atas, peneliti memutuskan untuk mengambil judul “Implikasi Euroskeptisisme Hungaria Di Bawah Kepemimpinan Viktor Orbán terhadap Hubungan Keanggotaannya Pada Uni Eropa” untuk penelitian ini.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, munculah sebuah rumusan masalah sebagai berikut, “Bagaimana Implikasi Euroskeptisisme Hungaria di Bawah kepemimpinan Viktor Orbán terhadap hubungan keanggotaannya pada Uni Eropa?”

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan fenomena Euroskeptisisme Hungaria di bawah kepemimpinan Viktor Orbán yang termanifestasi dalam berbagai dimensi kebijakan, mencakup dimensi hukum, ekonomi, kebijakan luar negeri serta respons terhadap krisis bersama UE.

1.3.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah terkait bagaimana Euroskeptisisme Hungaria di bawah kepemimpinan Viktor Orbán berimplikasi terhadap hubungan keanggotaannya pada UE.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

1.4.1. Kegunaan Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi hubungan internasional, khususnya dalam bidang Studi Eropa mengenai fenomena euroskeptisme beserta implikasinya terhadap hubungan antara negara anggota dengan lembaga supranasional, yaitu UE. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan yang ada dalam penelitian-penelitian sebelumnya dan menjadi bahan literatur bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi praktis bagi pembuat kebijakan dalam memahami bagaimana fenomena Euroskeptisisme dapat berimplikasi terhadap hubungan antara negara anggota dengan UE. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan dalam merancang kebijakan atau pendekatan alternatif terhadap negara-negara yang menunjukkan sikap euroskeptis.

1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1. Tinjauan Pustaka

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan sejumlah penelitian terdahulu sebagai pendukung untuk memperkuat argumen dari penelitian yang akan dilakukan. Penelitian yang secara spesifik mengkaji implikasi Euroskeptisisme Hungaria di bawah kepemimpinan Viktor Orbán terhadap hubungan keanggotaannya pada UE belum pernah dikaji dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Akan tetapi, terdapat sejumlah penelitian terdahulu yang telah mengkaji fenomena Euroskeptisisme di Hungaria pada masa kepemimpinan Viktor Orbán. Lebih lanjut, terdapat pula penelitian-penelitian terdahulu yang menganalisis berbagai aspek ketegangan dalam hubungan antara Hungaria dan UE, serta karakteristik Euroskeptisisme di kawasan Eropa sehingga dapat dijadikan sebagai landasan tinjauan pustaka.

Kajian literatur pertama adalah milik Gulácsi & Kerényi (2024) dengan penelitiannya yang berjudul “*Hungary and the European Union: the drift towards disintegration*”. Penelitian tersebut mengkaji bagaimana transformasi politik Hungaria sejak tahun 2010 yang ditandai dengan penguatan kekuasaan, pelemahan institusi demokrasi dan pelanggaran prinsip fundamental UE yang tertuang dalam *Treaty on European Union*. Gulácsi & Kerényi (2024) menyimpulkan bagaimana tindakan-tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai kolektif UE yang menimbulkan konflik serta ketegangan antara Hungaria dengan UE. Selanjutnya, penelitian ini turut menjelaskan respons UE terhadap pelanggaran tersebut, khususnya mekanisme Article 7

yang belum mampu menghasilkan tekanan yang efektif (Gulácsi & Kerényi, 2023).

Kajian literatur kedua berjudul “*Euroscepticism Across Europe: Drivers and Challenges*” milik Monika Condruz-Băcescu (2014). Dalam penelitian tersebut, Condruz-Băcescu menggarisbawahi bagaimana Euroskeptisisme telah menjadi salah satu tantangan besar dalam stabilitas dan masa depan UE. Fenomena ini semakin meluas dimana negara-negara Eropa semakin mempertanyakan legitimasi UE, khususnya dalam konteks ekonomi. Condruz-Băcescu berpendapat bahwa Euroskeptisisme menyebabkan turunnya tingkat kepercayaan publik dan meningkatnya persepsi negatif terhadap UE. Condruz-Băcescu dalam penelitiannya mengatakan bahwa kebangkitan Euroskeptisisme tidak hanya menjadi tantangan bagi para elit politik saja, melainkan turut mengancam kesatuan kawasan Eropa (Condruz-Băcescu, 2014).

Kajian literatur ketiga milik Gergely Agoston (2024) dengan judul “*Playing on distance: a relational rhetorical analysis of Viktor Orbán's Euroscepticism*”, turut membahas mengenai strategi Orbán dengan fokus terhadap sikap-sikap euroskeptisme yang tercermin melalui kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintahannya. Agoston berargumen bahwa sikap Euroskeptisisme yang ditunjukkan oleh Orbán merupakan upaya untuk menentang kebijakan-kebijakan UE yang seringkali dinarasikan sebagai upaya perlindungan kedaulatan nasional Hungaria. Agoston menggunakan analisis retorika rasional untuk menjelaskan bagaimana Orbán berhasil menjaga keseimbangan dalam mempromosikan sikap kritis terhadap kebijakan

UE sembari mempertahankan keanggotaan Hungaria di dalam UE. Penelitian ini turut mengeksplorasi bagaimana para pemimpin seperti Orbán, dapat mengendalikan sikap euroskeptis mereka tanpa sepenuhnya menentang UE (Agoston, 2024).

Kajian literatur keempat adalah milik Andrea Eltető and Tamás Szemler (2023) dengan judul “*Hungary in the European Union—Cooperation, Peacock Dance and Autocracy*”. Penelitian tersebut menjelaskan mengenai hubungan kompleks antara Hungaria dan UE, dimana ketegangan antara kedua entitas tersebut semakin meningkat. Peneliti menyoroti penggunaan retorika euroskeptis dalam kebijakan-kebijakan Hungaria, khususnya dalam isu ekonomi, migrasi dan kedaulatan negara. Di dalam penelitian tersebut, dijelaskan bagaimana pemerintahan Orbán menarasikan UE sebagai sebuah entitas yang mengancam kedaulatan nasional Hungaria. Selain itu, penelitian ini turut menjelaskan bagaimana pemerintahan Orbán menggunakan strategi “*peacock dance*” untuk dapat menyeimbangkan narasi anti-EU di depan publik sembari bekerja sama dengan UE di belakang layar (Éltető & Szemlér, 2023).

Kajian literatur kelima berjudul “*We won’t let Brussels dictate us’: Eurosceptic populism in Hungary and Poland*” milik Robert Csehi & Edit Zgut (2020). Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kemunculan partai-partai euroskeptis di negara-negara anggota UE merupakan akibat dari berbagai krisis yang melanda Eropa. Csehu & Zgut (2020) mencoba menjelaskan bagaimana narasi populis euroskeptis di Hungaria berkembang melalui strategi Orbán yang menggambarkan UE sebagai ‘elit korup’ yang bertentangan dengan

‘rakyat’ Hungaria dan kedaulatan nasional Hungaria. Penelitian ini berfokus pada penjelasan mengenai hubungan antara Euroskeptisisme dan populis di kawasan Eropa Tengah dan Timur.

Berdasarkan tinjauan literatur-literatur di atas, penelitian-penelitian sebelumnya telah menjelaskan pemerintahan Orbán yang euroskeptis. Akan tetapi, terdapat kesenjangan atau *gap* dalam penelitian-penelitian tersebut, di mana kurangnya penjelasan lebih mendalam mengenai implikasi sikap euroskeptis Hungaria tersebut terhadap hubungan keanggotaannya pada UE. Atas dasar tersebut, penelitian ini bertujuan untuk membahas lebih lanjut bagaimana Euroskeptisisme Hungaria pada masa kepemimpinan Orbán berimplikasi terhadap hubungan keanggotaannya pada UE. Maka dari itu, peneliti meyakini bahwa penggunaan konsep Euroskeptisisme menjadi alat analisis yang tepat dalam mengkaji bagaimana Euroskeptisisme Hungaria pada masa kepemimpinan Orbán memengaruhi pendekatan Hungaria dalam kebijakan-kebijakannya terkait UE dan bagaimana hal tersebut menimbulkan konflik antara Hungaria dengan UE.

1.5.2. Kerangka Teori

1.5.2.1. Neofungsionalisme

Teori neofungsionalisme menjadi kerangka teori utama yang akan digunakan dalam penelitian ini. Secara tradisional, neofungsionalisme dikenal sebagai teori integrasi Eropa yang menjelaskan proses bagaimana negara-negara Eropa mengalihkan sebagian kewenangan dari kedaulatan nasionalnya kepada lembaga-

lembaga supranasional seperti UE. Proses ini berlangsung melalui dinamika *spillover*, yaitu ketika integrasi di satu sektor menciptakan dorongan untuk memperluas kerja sama ke sektor lainnya. Menurut Schmitter (2002), teori ini menekankan peran aktor negara dalam mendorong integrasi di kawasan regional, sekaligus mengakui bahwa negara-negara anggota tidak secara mutlak menentukan arah integrasi selanjutnya. Dengan kata lain, terdapat potensi munculnya suatu konsekuensi yang tidak diharapkan ketika negara memberikan tanggung jawab tertentu kepada lembaga supranasional (Schmitter, 2002).

Teori ini menjadi relevan dalam memahami tantangan yang ditimbulkan oleh pemimpin euroskeptis seperti Viktor Orbán di Hungaria, yang menerapkan kebijakan penentangan terhadap integrasi Eropa. Untuk menganalisa fenomena penentangan dan potensi konsekuensinya, penelitian ini mengadopsi perkembangan terkini dari teori neofungsionalisme. Schmitter & Lefkofridi (2016) mengemukakan bahwa logika neofungsionalisme tidak hanya dapat menjelaskan integrasi melalui *spillover*, tetapi juga dapat digunakan untuk menganalisa potensi disintegrasi melalui *spillback*. Proses *spillback* terjadi ketika negara anggota tidak lagi ingin terlibat dalam suatu kebijakan di tingkat supranasional. Dalam kerangka tersebut, Schmitter & Lefkofridi (2016) merumuskan serangkaian asumsi dan hipotesis neofungsionalisme yang dapat digunakan untuk menilai kondisi-kondisi yang mendukung atau menghambat integrasi. Ketika asumsi-asumsi

tersebut terbukti tidak terkonfirmasi dalam realitas empiris suatu negara anggota, hal tersebut mengindikasikan meningkatkan kemungkinan pelemahan integrasi yang terjadi ketika negara-negara anggota memutuskan untuk tidak lagi mematuhi kebijakan dalam bidang tertentu karena ketidakpuasan terhadap tata kelola lembaga supranasional. Dalam kondisi tersebut, negara anggota dapat mengurangi komitmennya terhadap kebijakan bersama atau bahkan membatasi kewenangan lembaga supranasional. Schmitter & Lefkofridi (2016) mengidentifikasi bahwa ketika asumsi-asumsi yang menjadi syarat keberlangsungan integrasi tidak terpenuhi, organisasi supranasional akan semakin bergantung pada kemampuan peradilannya untuk mempertahankan kepatuhan negara anggota. Dalam hal ini, lembaga supranasional bergerak dari mekanisme yang bersifat persuasif menuju mekanisme penegakan yang semakin tegas dan koersif (Schmitter & Lefkofridi, 2016).

Dalam penelitian ini, dinamika *spillback* tersebut dianalisis melalui empat aspek utama yang diturunkan dari asumsi-asumsi dan hipotesis dalam teori neofungsionalisme Schmitter & Lefkofridi (2016). Pertama, interdependensi dan konvergensi ekonomi. Neofungsionalisme mengasumsikan bahwa integrasi ekonomi akan meningkatkan interdependensi antarnegara anggota secara merata dan mendorong konvergensi dalam kinerja ekonomi. Integrasi pasar tunggal diharapkan menciptakan situasi saling ketergantungan yang memperkuat stabilitas

kawasan dan menguntungkan seluruh anggota secara merata (Schmitter & Lefkofridi, 2016).

Kedua, legitimasi publik dan politisasi integrasi. Neofungsionalisme dalam kerangka yang disusun oleh Schmitter & Lefkofridi (2016) berasumsi bahwa manfaat integrasi yang dirasakan oleh masyarakat akan memperkuat dukungan publik terhadap proyek-proyek supranasional, di mana persepsi positif terhadap manfaat integrasi berfungsi sebagai pendorong utama di balik penguatan kerja sama di antara negara-negara anggota. Neofungsionalisme juga mengasumsikan bahwa negara-negara anggota harus memiliki rezim yang demokratis dan liberal, yang berarti menghormati prinsip *rule of law* dan hak asasi manusia. Syarat-syarat tersebut tidak hanya harus dipenuhi oleh negara anggota pada saat mereka bergabung, tetapi juga harus dipertahankan selama masa keanggotaan. Selain itu, politisasi yang terjadi selama proses integrasi pada dasarnya bersifat konstruktif karena didorong oleh persepsi akan manfaat bersama yang dirasakan oleh masyarakat (Schmitter & Lefkofridi, 2016). Ketika asumsi-asumsi tersebut tidak terkonfirmasi oleh kondisi aktual suatu negara anggota, hal ini mengindikasikan meningkatnya kemungkinan terjadinya *spillback* dalam dimensi legitimasi publik.

Ketiga, kepatuhan terhadap hukum dan otoritas supranasional. Dalam kerangka neofungsionalis, integrasi bersifat mengikat dan berkembang secara bertahap melalui aturan serta keputusan yang

dihasilkan oleh lembaga supranasional. Kerangka neofungsionalisme milik Schmitter & Lefkrofridi (2016) berargumen bahwa kebijakan dari organisasi supranasional seharusnya bersifat *self-enforcing* atau mandiri karena negara anggota merasakan manfaat dari kepatuhan. Dengan demikian, negara-negara anggota akan terdorong untuk memenuhi komitmennya (*pacta sunt servanda*) secara sukarela dan efektif bahkan ketika mereka tidak menyetujui keputusan yang diambil. Ketika pola ketidakpatuhan terjadi dan negara-negara anggota secara konsisten mengabaikan keputusan lembaga hukum supranasional, hal tersebut mengindikasikan peningkatan kemungkinan *spillback* dalam dimensi kepatuhan hukum yang secara langsung melemahkan otoritas dan kapabilitas penegakan hukum dari organisasi supranasional (Schmitter & Lefkrofridi, 2016).

Keempat, respons terhadap kebijakan bersama dalam situasi krisis. Aspek keempat yang digunakan untuk menganalisis dinamika *spillback* dalam hubungan keanggotaan Hungaria dengan UE adalah respons terhadap kebijakan bersama dalam situasi krisis. Schmitter & Lefkrofridi (2016) berargumen bahwa konflik yang muncul selama proses integrasi pada umumnya berasal dari proses integrasi itu sendiri dan dapat diselesaikan melalui mekanisme bersama. Selain itu, Schmitter & Lefkrofridi mengidentifikasi bahwa gangguan eksternal (*exogenous shocks*) berpotensi menimbulkan dampak yang beragam pada negara-negara anggota dan menjadi sumber konflik internal yang lebih sulit

diselesaikan karena organisasi supranasional kemungkinan besar tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk mengatasinya. Ketika negara-negara anggota justru memilih pendekatan unilateral yang bertentangan dengan solidaritas kebijakan bersama, hal ini mengindikasikan potensi dinamika *spillback* (Schmitter & Lefkofridi, 2016).

Dengan demikian, kerangka neofungsionalisme sebagai teori disintegrasi oleh Schmitter & Lefkofridi (2016) memberikan empat aspek analitis yang diturunkan langsung dari *supposition* dan hipotesis eksplisit dalam teori tersebut untuk mengkaji implikasi melemahkan hubungan keanggotaan Hungaria dengan UE di bawah kepemimpinan Viktor Orbán.

1.5.2.2. Konsep: Eurosepticism

Euroseptisisme merupakan sebuah konsep dalam studi integrasi regional Eropa yang merujuk pada bentuk keraguan, ketidakpuasaan, penolakan atau sikap kritis terhadap proyek integrasi UE. Taggart & Szczerbiak (2002) mendefinisikan Euroseptisisme sebagai sebuah gagasan dimana terdapat oposisi atas proses integrasi Eropa. Penyebab dari rasa ketidakpuasaan terhadap UE tersebut dapat bersumber dari berbagai faktor, seringkali berasal dari permasalahan ekonomi atau identitas (Csehi & Zgut, 2020). Dalam hal budaya dan identitas, ketidakpuasaan ini berasal dari perubahan sosial yang pesat dalam masyarakat Barat, dimana meningkatnya diversitas dan nilai-nilai progresif terkadang berbenturan dengan persepsi dan kemampuan

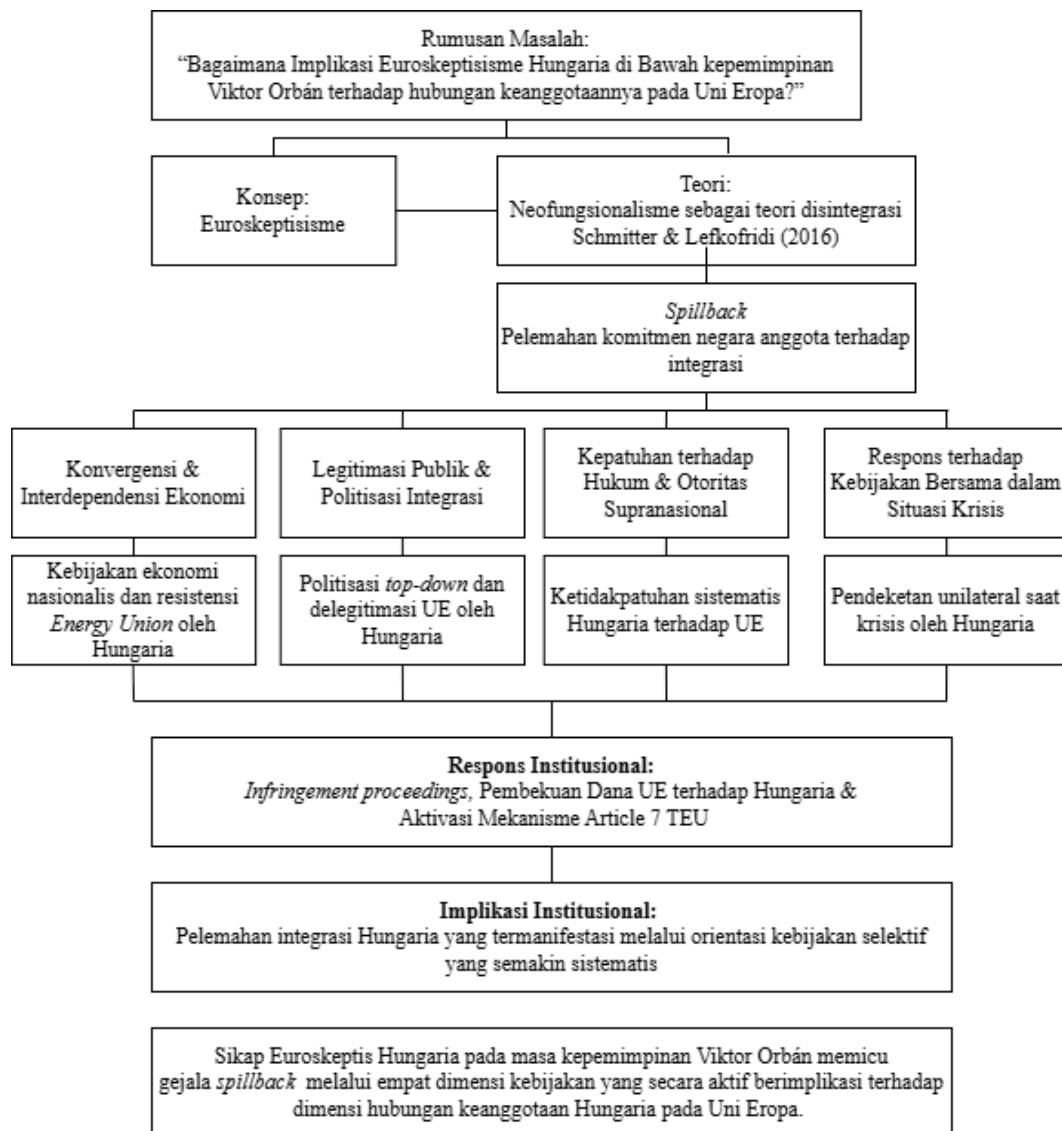
beradaptasi kelompok demografis tertentu (Rodríguez-Pose et al., 2024). Selain itu, kritik terhadap UE juga sering dikaitkan dengan kekhawatiran mengenai semakin besarnya kewenangan institusi supranasional yang dinilai dapat mengurangi ruang pengambilan keputusan di tingkat nasional serta menciptakan kesan bahwa UE berkembang menjadi struktur politik yang terlalu terpusat (Condruz-Băcescu, 2014).

Euroskeptisisme dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu hard euroscepticism dan soft euroscepticism. Jenis hard euroscepticism diartikan sebagai penolakan langsung terhadap seluruh proyek integrasi Eropa serta penentangan terhadap keanggotaan negaranya di UE. Sementara itu, soft euroscepticism dimaknai sebagai kekhawatiran atau penolakan terhadap aspek-aspek tertentu dari kebijakan atau nilai-nilai UE, meskipun tetap menerima keanggotaan di dalamnya (Taggart & Szczerbiak, 2002). Dengan kata lain, Euroskeptisisme dapat dipahami tidak hanya sebagai sebuah penolakan total terhadap UE, tetapi lebih sebagai penentangan atas cara dan arah integrasi dari UE (Vasilopoulou, 2009).

Dalam penelitian ini, Euroskeptisisme dipahami tidak sebagai penolakan total terhadap keanggotaan Hungaria pada UE, melainkan sebagai bentuk penentangan terhadap arah integrasi dan perluasan kewenangan supranasional yang dianggap membatasi kedaulatan nasional. Sikap ini menjadi faktor penting dalam menganalisis

bagaimana dinamika domestik Hungaria berimplikasi terhadap hubungan keanggotaannya pada UE.

Berikut adalah alur kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini.



Gambar 1.2. Alur Kerangka Berpikir
Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

1.6. Operasionalisasi Konsep

1.6.1. Definisi Konseptual

1.6.1.1. Euroskeptisisme

Taggart & Szczerbiak (2002) mendefinisikan Euroskeptisisme sebagai sebuah gagasan dimana terdapat sebuah oposisi atas proses integrasi Eropa. Euroskeptisisme dapat dipahami tidak hanya sebagai sebuah penolakan total terhadap UE, tetapi juga sebagai penentangan atas cara dan arah integrasi dari UE.

1.6.1.2. Spillback

Spillback merupakan konsep dalam teori neofungsionalis sebagai teori disintegrasi yang menggambarkan proses kebalikan dari *spillover*. Jika *spillover* merujuk pada kondisi di mana integrasi di satu sektor mendorong perluasan integrasi ke sektor lainnya, maka *spillback* merujuk pada kondisi di mana negara anggota tidak lagi bersedia menangani kebijakan di tingkat supranasional sehingga komitmen terhadap integrasi melemah (Schmitter & Lefkofridi, 2016). Schmitter & Lefkofridi (2016) mengidentifikasi *spillback* sebagai salah satu kemungkinan hasil dari proses integrasi regional ketika asumsi-asumsi neofungsionalisme tidak terkonfirmasi dalam realitas negara anggota.

1.6.1.3. Integrasi Eropa

Integrasi Eropa mengacu pada sebuah proses historis di mana negara-negara Eropa menggabungkan kekuatan dan kedaulatan mereka dalam satu kesatuan kolektif (Dağdemir & Akdemir, 2019). Integrasi dalam konteks politik dimaknai sebagai upaya untuk mempersatukan

sebuah kelompok yang terdiri atas dua entitas atau lebih. Integrasi politik dilakukan melalui pembentukan kerangka peraturan yang selaras, menciptakan sebuah institusi bersama yang memiliki wewenang dalam pembuatan keputusan, dan menciptakan sebuah identitas komunitas yang terintegrasi sebagai pengganti identitas yang sudah ada sebelumnya dari unit-unit politik (Ilievski, 2015).

1.6.1.4. Kedaulatan Nasional

Kedaulatan nasional merupakan prinsip dasar yang mengatur bagaimana negara-negara berinteraksi dengan satu sama lain. Kedaulatan nasional mengacu pada kesetaraan yuridis milik negara dan kebebasan bagi negara-negara tersebut untuk mengambil tindakan, baik di dalam maupun di panggung internasional. Kedaulatan nasional memberikan hak bagi negara untuk mengelola urusan internalnya dan menentukan arah hubungan eksternal mereka (Allègre & Vaillancourt, 1971).

1.6.2. Definisi Operasional

1.6.2.1. Euroskeptisisme

Dalam penelitian ini, suatu kebijakan atau sikap dari pemerintahan Orbán dikategorikan sebagai bentuk Euroskeptisisme apabila memenuhi salah satu dari tiga karakteristik berikut. Pertama, resistensi terhadap mekanisme supranasional UE, yaitu penolakan atau pembatasan terhadap kewenangan lembaga-lembaga UE dalam mengawasi atau mengatur kebijakan domestik Hungaria. Kedua, penolakan terhadap nilai fundamental UE, yaitu kebijakan yang secara

eksplisit bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar UE sebagaimana tercantum dalam Article 2 TEU, seperti *rule of law*, independensi peradilan, kebebasan pers dan hak asasi manusia. Ketiga, pembingkai UE sebagai aktor eksternal yang mengancam, yaitu narasi politik yang memposisikan UE sebagai pihak yang bersebrangan dengan kedaulatan nasional, identitas budaya atau kepentingan domestik Hungaria.

1.6.2.2. Spillback

Dalam penelitian ini, *spillback* dioperasionalkan sebagai mekanisme yang menjelaskan bagaimana sikap euroskeptis pemerintahan Orbán menghasilkan implikasi terhadap hubungan keanggotaan Hungaria dengan UE. *Spillback* dianalisis melalui empat aspek yang diturunkan dari asumsi-asumsi teori neofungsionalisme milik Schmitter & Lefkofridi (2016).

1.6.2.3. Integrasi Eropa

Dalam penelitian ini, proses integrasi Eropa akan dikaji melalui kepatuhan atau ketidakpatuhan Hungaria terhadap prinsip-prinsip UE, partisipasi dalam proyek UE dan keterlibatannya dengan lembaga-lembaga UE. Lebih spesifik, analisis dalam penelitian ini akan berfokus pada tindakan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Hungaria dalam berbagai dimensi, yang mencakup hukum, ekonomi, kebijakan luar negeri dan respons terhadap krisis bersama UE.

1.6.2.4. Kedaulatan Nasional

Dalam penelitian ini, kedaulatan nasional akan dianalisis dengan meninjau kebijakan Hungaria yang dinilai menentang prinsip-prinsip UE. Dalam hal ini, pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh Orbán mengenai perlindungan budaya dan perbatasan Hungaria akan ditelaah untuk memahami bagaimana kedaulatan nasional dijadikan sebagai salah satu alasan dari munculnya sikap Euroskeptisisme di Hungaria.

1.7. Argumen Penelitian

Penelitian ini berargumen bahwa sikap Euroskeptis Hungaria pada masa kepemimpinan Viktor Orbán merepresentasikan sebuah proses *spillback* yang secara aktif berimplikasi terhadap hubungan Hungaria dengan UE. Dengan membingkai UE sebagai sebuah ancaman eksternal terhadap kedaulatan nasional, identitas budaya dan kepentingan domestik Hungaria, Pemerintahan Orbán telah menginstitutionalisasi penolakan terhadap nilai dan aturan fundamental UE melalui serangkaian kebijakan yang dapat dikategorikan sebagai sikap euroskeptis. Hal ini tidak hanya mempengaruhi kebijakan domestik Hungaria tetapi juga berkontribusi pada bagaimana kebijakan Orbán telah memicu gejala *spillback* pada empat aspek dalam hubungan keanggotaan, yaitu interdependensi dan konvergensi ekonomi, legitimasi publik dan politisasi integrasi, kepatuhan terhadap hukum dan otoritas supranasional, serta respons terhadap kebijakan bersama dalam suatu krisis. Dengan demikian, penelitian ini berargumen bahwa Euroskeptisisme Hungaria pada masa kepemimpinan Orbán ini berimplikasi secara

langsung terhadap hubungan keanggotaan Hungaria dalam UE melalui pelemahan komitmen terhadap proses integrasi regional.

1.8. Metode Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2015), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti sebuah kondisi objek alamiah, dimana instrumen kunci terletak pada peneliti dan hasil dari penelitian yang lebih menekankan pada makna dibandingkan generalisasi.

1.8.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan tipe penelitian deskriptif, dimana penelitian ini akan berfokus pada mendeskripsikan dan menginterpretasikan karakteristik dari fenomena sesuai dengan rumusan masalah yang telah diajukan di awal. Tipe penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memperoleh informasi-informasi terkait suatu gejala atau fenomena yang terjadi sesuai dengan hasil dari penelitian yang tengah dilaksanakan. Tipe penelitian deskriptif tidak ditujukan untuk menguji suatu hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan keadaan sebenarnya dari suatu gejala yang tengah diteliti (Zellatifanny & Mudjiyanto, 2018).

1.8.2. Situs Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan melalui *desk research* di domisili peneliti, yaitu Kota Semarang, baik melalui internet maupun lokasi-lokasi lain yang dapat mendukung penelitian ini, seperti Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Perpustakaan Universitas Diponegoro.

1.8.3. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini meliputi pemerintahan Hungaria pada masa kepemimpinan Perdana Menteri Viktor Orbán, terutama sejak tahun 2010. Penelitian ini turut berfokus pada Uni Eropa dan institusi-institusinya sebagai lembaga supranasional yang merespon sikap-sikap euroskeptis Hungaria serta memiliki ketegangan hubungan dengan pemerintah Hungaria

1.8.4. Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang bersifat deskriptif. Data kualitatif merupakan data yang diperoleh dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata, gambar atau perilaku (Sidiq & Choiri, 2019).

1.8.5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data sekunder merupakan data yang telah terkumpul oleh peneliti terdahulu (Sidiq & Choiri, 2019). Dalam penelitian ini, sumber data sekunder didapatkan melalui dokumen resmi yang diterbitkan langsung oleh Pemerintah Hungaria dan Uni Eropa melalui laman resminya, buku, jurnal penelitian terdahulu dan artikel berita yang didapatkan dari media yang kredibel.

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang pada umumnya digunakan oleh seorang peneliti untuk memperoleh data penelitian dari sumber data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah *library research* atau studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan teknik yang

pengumpulan suatu data melalui penelaahan buku, literatur dan berbagai laporan yang berkaitan dengan rumusan masalah yang diajukan (Nazir, 2003).

1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data

Analisis dan interpretasi data menjadi langkah selanjutnya dalam menarik kesimpulan atas penelitian yang telah dilaksanakan. Penelitian ini akan melakukan analisis data dengan menggunakan metode analisis konten (*content analysis*) untuk menginterpretasikan makna dari suatu konten tertulis melalui proses identifikasi tema dan pola yang relevan dengan pertanyaan penelitian (Mayring, 2000). Metode ini diterapkan melalui identifikasi kebijakan euroskeptis pemerintahan Orbán dan analisa pola-pola tersebut menggunakan kerangka teori yang telah dipilih.

1.8.8. Kualitas Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data adalah uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang diperoleh dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini menjadi hal penting untuk memastikan kualitas dari suatu hasil penelitian. Teknik pemeriksaan terhadap keabsahan data dalam suatu penelitian kualitatif mencakup uji kredibilitas (*credibility*), uji transferabilitas (*transferability*), uji kebergantungan (*dependability*) dan terakhir uji konfirmabilitas (*confirmability*) (Sugiyono, 2015). Untuk memastikan bahwa data hasil penelitian yang dilakukan bersifat valid dan akurat, penulis akan menggunakan teknik-teknik di atas. Hasil yang disajikan dalam penelitian ini terkait dengan fenomena Euroskeptisisme Hungaria pada masa kepemimpinan Viktor Orbán dan implikasi terhadap hubungan antara Hungaria dengan Uni Eropa, diperoleh

melalui metode pengumpulan yang sesuai dan terstruktur. Dengan demikian penulis dapat memperoleh data-data yang dibutuhkan.